

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
(Agus Purnomo)

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung
(Dora Rinova)

Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang
(Gladytha Gunawan)

Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung
(Kukuh Julian)

Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
(Malik)

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro
(Neysa Amallia, Erwin Putu Basai)

Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung
(Veronika Saptarini)



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

Pembina

Dr.Ir. M. Yusuf S.Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr.Yadi Lustiadi,M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik,M.Si

Penyunting Ahli

Prof.Dr. Yulianto,M.Si(FISIP-UNILA)

Dr.Akhmad Suharyo,M.Si (FISIP-UBL)

Dr.Nur Efendi,M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal,M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Desi Wahyuni, S.A.P

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu- Bandar Lampung 35142

Telp:(0721) 789825, Fax:(0721) 770261,E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

DAFTAR ISI

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	1-22
Agus Purnomo	
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung	23-38
Dora Rinova	
Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (GERBANG DESA SABURAI) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	39-46
Gladytha Gunawan	
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	47-53
Kukuh Julian	
Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	54-63
Malik	
Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro	64-75
Neysa Amallia, Erwin Putubasai	
Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung	76-87
Veronika Saptarini	

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
TERPADU (SIMPEDU) PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

**Dr. AGUS PURNOMO, M.M., DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

The type of research used in this research is through qualitative research method approach. Qualitative data analysis process is done by data reduction phase, presentation of data (display) and draw conclusion (verification). Based on the result of the research, it can be concluded that the implementation of Integrated Personnel Management Information System at the Regional Personnel Board of Lampung Province has been run in accordance with the flow that must be undertaken, among others, include input sub-system, process sub-system and output sub-system.

Obstacles encountered in the application of Integrated Personnel Management Information System at the Regional Personnel Board of Lampung Province, among others, infrastructure and human resources are inadequate, and local government support is still not optimal. Efforts that have been made in overcoming the obstacles of the implementation of Integrated Personnel Management Information System at the Regional Personnel Board of Lampung Province that is the human resources in the Field Documentation and Information Officer BKD Lampung Province should be included Training / training on SIMPEDU so that existing human resources can more controlled about SIMPEDU.

Efforts that have not been done in overcoming the obstacles of the implementation of Integrated Personnel Management Information System at the Regional Personnel Board of Lampung Province is to integrate the application SIMPEDU to all OPD in the local government of Lampung Province.

Keywords: *Implementation, Integrated Personnel Management Information System*

I. PENDAHULUAN

Peningkatan efektivitas kerja pegawai, dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU). SIMPEDU

sendiri mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran proses administrasi diperlukan keseragaman aplikasi data yang memungkinkan pengendalian optimal atas aktivitas-aktivitas

administrasi pemerintah daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) di BKD Provinsi Lampung setelah adanya pengembangan agar mampu menghasilkan informasi yang tepat atau informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi BKD, terutama dalam melaksanakan tugasnya yakni memberikan pelayanan kepegawaian terhadap PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung serta menyediakan informasi kepegawaian bagi *stakeholders*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sumantri mengemukakan bahwa Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-

sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan”.

Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui kepada pengguna. Sebagian besar informasi yang dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang atau organisasi-organisasi di luar perusahaan.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Dewi (2008), bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu sama dengan konsep sistem informasi manajemen pada umumnya, yaitu terdiri dari

masuk (input), proses (transformasi) dan keluaran (output).

Dalam penyusunan SIMPEDU yang melingkupi proses pengumpulan data hingga menjadi informasi baru seperti yang dikemukakan oleh McLeod dan G. Schell dalam pengertian tentang SIMPEDU, maka dapat diketahui bahwa peranan teknologi informasi menjadi hal yang sangat mendasar untuk proses awal tersebut. Dalam hal ini, peranan komputer untuk proses penyusunan selanjutnya berupa format-format yang terstruktur memungkinkan proses pencatatan dapat lebih akurat sehingga proses kerja menjadi lebih cepat. Dalam proses audit pengolahan data, peranan komputer menjadi sangat penting di antaranya: pengumpulan data, analisis data, dan penyimpanan informasi.

Proses selanjutnya, peranan teknologi informasi melingkupi proses output. Dalam hal ini merupakan proses akhir dari sebuah perubahan data menjadi informasi yang baru. Langkah-langkah di atas akan sangat berpengaruh pada kinerja pegawai yakni lebih menambah motivasi kerja sehingga pekerjaan lebih cepat dilakukan. Dalam tulisan ini pula akan diperbandingkan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh pegawai dalam proses perumusan SIMPEDU dengan cara manual dan cara komputerisasi. Perbandingan ini dimaksudkan agar dapat diketahui bagaimana kinerja para pegawai dengan menggunakan *electronic computer*.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

2) Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

V. PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terkait dengan pengumpulan data pegawai dari OPD hingga keluarnya SK dan informasi sebagai *Output* sesuai dengan standar baku prosedur pelaksanaan kerja. Sejak pertama kali pembangunan SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung telah terjalin kerjasama dan kesepakatan antara OPD dengan BKD dalam memberikan informasi kepegawaian, dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Sub Sistem *Input* (Data Masukan)

Di dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan SIMPEDU

yang dijalankan oleh BKD Provinsi Lampung, subsistem *input* merupakan proses awal dari sebuah perjalanan arus informasi. Dalam sub sistem *input* ini dikumpulkan data masukan dari OPD-OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung maupun bidang-bidang kerja yang berada di internal BKD. BKD sebagai instansi pelaksana dari SIMPEDU berkewajiban untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data kepegawaian dari masing-masing OPD.

Sedangkan untuk mengetahui bahwa suatu sistem itu merupakan sistem informasi yang baik, dapat dilihat dari informasi yang masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM). Informasi yang dihasilkan itu harus merupakan informasi yang tepat, dalam hal ini informasi itu harus memenuhi kualitas informasi. Karakteristik untuk mengidentifikasi sistem informasi yang berkualitas, yaitu dapat dilihat dari:

a. Dimensi Isi dan Bentuk

Keberadaan SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung tidak lepas dari program pengisian Formulir Isian Pegawai (FIP) yang pada awalnya telah dikeluarkan oleh Kantor Pusat Data Elektronik (KPDE) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Data yang digunakan sebagai masukan database SIMPEDU adalah seluruh data PNS yang tercatat didalam Formulir Isian Pegawai (FIP) yang diedarkan ke seluruh OPD oleh BKD, kecuali pada pengangkatan pegawai baru sejak pengangkatan CPNS. Data pegawai baru memang telah di catat oleh BKD ke dalam SIMPEDU melalui pemberkasan CPNS dan pengangkatan PNS. Hal ini seperti informasi yang diungkapkan oleh Silvia selaku Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian sebagai berikut:

“*Input* data ini kita patokanya pada FIP. Semua mengacu dari FIP, jika semua

sudah terpenuhi dan sudah valid maka program bisa kita gunakan.”

Juga dikuatkan dan ditambahkan oleh pernyataan Pram Wisnu Seto selaku Administrator SIMPEDU dalam pelaksanaan SIMPEDU sebagai berikut:

“Kalau untuk sekarang datanya bisa dilihat dari apa saja bisa dilihat dari FIP, seperti itu data yang dimasukkan ke dalam SIMPEDU. *Input* datanya di mulai sejak pemberkasan CPNS, kemudian setiap ada penambahan atau perubahan data dimasukkan sehingga menjadi data yang sekarang.”

Dari seluruh hasil tersebut, dapat diketahui pula bahwa bentuk FIP sesuai dengan *form* yang telah ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Data-data yang ada di dalam Formulir Isian Pegawai (FIP) tersebut menjadi acuan dalam pemrograman SIMPEDU.

Selanjutnya setiap terdapat perubahan data pegawai dilaporkan melalui pengiriman formulir pelaporan rutin oleh OPD kepada BKD setiap bulan. Pelaporan ini menggunakan formulir rekapitulasi perubahan data pegawai yang formatnya telah ditentukan oleh BKD. Di dalam pelaporan ini, jika terdapat perubahan data, maka FIP dan bukti fisik wajib dilampirkan pada pegawai yang mengalami perubahan data.

Maka dapat dikatakan bahwa data *input* (masukan) adalah formulir laporan rekapitulasi perubahan data pegawai dan Formulir Isian Pegawai (FIP) yang diisi oleh pegawai atau pun OPD. Isi *input* data tersebut mencakup data personal pegawai secara detail. Berdasarkan bentuk dan isi FIP serta formulir perubahan data setiap bulan, dapat dikatakan isi dan bentuk

input sudah jelas dan lengkap.

Setelah data-data tersebut masuk ke BKD dan dilakukan pengecekan data yang masuk dengan tanda bukti terlampir kemudian perubahan data dimasukkan ke dalam database SIMPEDU dimana pada saat itu pula juga terjadi pengecekan kebenaran data yang masuk dengan otomasi komputer. Disini terlihat bahwa dalam proses *input* data masih mengandalkan kemampuan manual pegawai. Namun ketika data diketikkan ke dalam komputer, sistem komputasi melakukan penjagaan otomatis dengan tidak menerima duplikasi data dan perbedaan data dengan *data master*. Dari sini terlihat adanya kolaborasi antara kemampuan personel dan teknologi komputasi yang digunakan dalam menjamin validitas data yang masuk ke dalam SIMPEDU.

b. Dimensi Waktu

BKD Provinsi Lampung sebagai Badan yang bertugas mengelola seluruh data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mendapatkan data-data pegawai secara detail dan akurat dari berbagai OPD, untuk itu peran aktif dari OPD juga sangat dibutuhkan agar *input* data tidak tersendat dan pelaksanaan manajemen kepegawaian dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Diakui oleh Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian bahwa ketepatan waktu pelaporan perubahan data pegawai seringkali melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari pernyataan Silvia berikut:

“Terkadang pengiriman laporan lebih dari satu bulan, tetapi dipastikan meskipun terlambat, OPD selalu melaporkan perubahan data pegawainya. Jika terlalu lama tidak melaporkan, padahal data akan dipakai,

kita ingatkan melalui telepon, biasanya langsung dikirim setelah itu.”

Dalam kasus tertentu, berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian dan salah satu staf di BKD Provinsi Lampung, BKD melakukan pengambilan data pegawai dengan mendatangi langsung lokasi yang belum mengirimkan perubahan data. Hal ini terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena jumlah pegawai di Dinas ini cukup banyak dan tersebar di berbagai sekolah, administrasi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri masih belum tertib, sehingga untuk menanggulangnya, BKD mendatangi sendiri ke sekolah terkait. Mengenai hal ini seperti yang disampaikan oleh Silvia selaku Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian sebagai berikut:

“Tapi kalau memang terlambat BKD langsung mengambil lewat sekolah,

karena jika menunggu akan memakan waktu lama. Tetapi sekarang sudah membaik, biasanya kalau terlambat dan BKD sudah menelpon, langsung mengirimkan personelnya untuk mengantarkan data karena juga sudah ada koordinasi.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Pram Wisnu Seto sebagai berikut:

“Oh, soal itu, iya benar. Memang kemarin kita mengambil langsung dari sekolah, karena sekarang guru-guru masih menjadi satu dengan pegawai Disdikpora. Terlalu lama jika menunggu pelaporan itu.”

Hal ini mengindikasikan keseriusan BKD untuk mendapatkan data yang lengkap dan tepat waktu. Dalam rangka pengumpulan data, BKD juga telah melakukan koordinasi dengan OPD dengan komunikasi melalui telepon, dengan surat edaran, dan jika perlu sekali BKD mengumpulkan

bagian-bagian kepegawaian dari OPD-OPD. Untuk itu diperlukan pula kerjasama dari pihak OPD terkait untuk memperbaiki administrasi kepegawaian di instansinya serta kedisiplinan dalam pelaksanaan pelaporan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

Di dalam manajemen partisipasi pegawai dalam penerapan itu sendiri paling menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu sistem informasi. Partisipasi ini dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab, hubungan pengguna dengan sistem, dan penanganan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

2. Sub Sistem Proses
Merupakan suatu tahap berikutnya dalam perjalanan arus informasi, dimana di dalam SIMPEDU ini merupakan mekanisme pengolahan data untuk kemudian di simpan ke dalam suatu database. Di dalam pengolahan data di dalam database ini akan sangat mengacu pada sistem software

dan hardware yang efektif sehingga memperoleh *Output* sesuai dengan kebutuhan.

a. Database

Data-data yang disimpan dalam data base ini adalah data pegawai yang masuk ke dalam BKD dari laporan-laporan kepegawaian rutin, laporan perubahan data pegawai, dan Formulir Isian Pegawai (FIP). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Silvia selaku Kepala Sub Informasi Kepegawaian sebagai berikut:

“Database di sini berfungsi untuk menyimpan data-data dari *input* data, yang kemudian dimasukkan ke dalam SIMPEDU dan setelah masuk langsung diproses menjadi bank data jadi sewaktu-waktu kita sudah siap datanya. Jadi pada intinya kita sudah siap data.

Di dalam sub sistem proses ini, data yang masuk dari seluruh unit kerja diolah dan digolong-golongkan sehingga nantinya akan

menghasilkan *Output* data yang konsisten dengan *input* data. Hasil akhir yang nantinya dihasilkan pada *Output* data harus sesuai dengan proses pengolahan yang ada. BKD Provinsi Lampung sudah melakukan penjagaan kesesuaian data, yaitu dengan menggunakan penggolongan-penggolongan data menjadi *data master*, data pegawai dan data transaksi. *Data master* berisi menu-menu untuk pembuatan tabel referensi, dengan kata lain digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya tidak berubah (*statis*), perubahannya hanya untuk penambahan. Penggunaan *data master* ini sebagai data acuan, dimana pengisian data yang lain juga harus mengacu pada *tabel master* ini. Penjagaan yang dilakukan BKD yaitu, jika data yang *inputkan* tidak sesuai dengan *data master*, maka data tersebut tidak bisa masuk ke dalam sistem. Hal ini seperti keterangan

yang diberikan oleh Pram Wisnu Seto sebagai berikut:

“Data master itu isinya berarti menu-menu yang kaitannya nanti untuk tabel referensi. Data referensi itu tabel acuan. Berarti nanti pengisian di data transaksinya itu harus mengacu ke situ. Kalau tidak sesuai dengan yang di tabel masternya itu mesti tidak bisa masuk, karena data statis. Perubahannya itu paling untuk penambahan.”

Kemudian *input* data yang masuk digolongkan juga ke dalam data pegawai dan data transaksi. Data pegawai ini sebenarnya untuk melihat tampilan pegawai dan data-data pegawai secara khusus, dimana data itu tidak diperlukan dalam proses kepegawaian yang lain. Sedangkan data transaksi digunakan untuk menyimpan data yang setiap saat bisa berubah (bersifat dinamis). Form pendataan pada menu data transaksi merupakan *form* yang berbasis data

berkas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh F. Deny Kurniawan sebagai berikut:

“Data pegawai itu hanya untuk melihat tampilan pegawai. Terus kalau yang untuk data transaksi itu berisi transaksi kepegawaiannya.

Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa sub sistem proses disini merupakan kelanjutan dari *input* data yaitu dengan memasukkan *input* data ke dalam aplikasi SIMPEDU dengan menggolongkan data-data yang diterima sesuai kebutuhan. Penggolongan data dalam database SIMPEDU dapat dirinci sebagai berikut:

Data Pokok terdiri dari:

NIP, Nama, Gelar, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Status Kepegawaian, Jenis Kepegawaian, Kedudukan Pegawai, Alamat, Nomor Karpeg, Nomor Askes, Nomor Taspen, Nomor Karis/Karsu,

NPWP, Riwayat CPNS, Riwayat PNS, Gaji Berkala, Instansi Induk, Unit Kerja, Jabatan.

Riwayat Pegawai terdiri dari:

Pangkat, Jabatan, Riwayat Jabatan, Organisasi, Jasa, SKP, Hukuman, Cuti, Tugas Luar Negeri, Bahasa.

Riwayat Pendidikan terdiri dari:

Riwayat Pendidikan Umum, Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar, Kursus, Penataran .

Riwayat Keluarga terdiri dari:

Ayah, Ibu, Istri/Suami, Anak. Pengklasifikasian data ini dilakukan untuk memudahkan *user* mengambil data untuk kemudian digunakan masing-masing bidang untuk melaksanakan tugas. Di dalam pengolahan data ini akan sangat mengacu pada sistem *software* dan *hardware* yang efektif sehingga memperoleh

Output sesuai dengan kebutuhan.

b. Perangkat Keras (*Hardware*)

Pada dasarnya proses pengembangan, perubahan dan perbaikan sistem sangat terkait dengan pelengkapan/peralatan sistem. Penggunaan komputer sebagai media di dalam menjalankan sistem informasi mutlak dibutuhkan karena dengan adanya komputer tersebut telah menempatkan komputer sebagai pengolah data di dalam kedudukan yang sangat penting.

BKD dalam melaksanakan SIMPEDU juga tidak lepas dari adanya sarana komputer tersebut. Dimana teknologi komputerisasi merupakan aspek penunjang di dalam SIMPEDU itu sendiri. BKD sebagai pelaksana dan pengembang dari SIMPEDU memang diharuskan memiliki berbagai sarana pendukung. Sampai saat ini BKD sudah memiliki sejumlah perangkat keras pendukung dan sebuah

laboratorium komputer seperti yang dikemukakan oleh Silvia sebagai Kepala Sub Informasi Kepegawaian sebagai berikut:

“Di sini ada laboratorium komputer untuk mendukung pelaksanaan SIMPEDU. Perangkat keras seperti komputer dan perangkatnya, termasuk printer, dan lain-lain sudah memenuhi. Selain ada lab, di masing-masing bidang juga ada komputer dan printer. Totalnya ± ada 15 komputer. 6 di lab komputer dan lainnya tersebar di bidang-bidang.”

Penggunaan peralatan komputer tersebut juga telah dilengkapi dengan printer dan scanner. SIMPEDU yang ada di BKD Provinsi Lampung menggunakan teknologi perangkat keras komputer dengan perangkat keras pendukung seperti memory, hard disk, monitor, CD room, printer. Pada saat ini jumlah komputer yang ada di BKD sudah mencukupi karena didukung adanya

laboratorium komputer untuk mendukung pelaksanaan SIMPEDU. Memang tidak tidak semua komputer tersebut kondisinya baik dan sudah terdapat aplikasi SIMPEDU. Diantara 15 komputer yang ada terdapat 6 komputer yang dilengkapi dengan aplikasi SIMPEDU. Minimal disetiap bidang terdapat satu buah komputer yang terdapat aplikasi SIMPEDU.

Untuk menjalankan aplikasi SIMPEDU dan menyimpan database SIMPEDU, digunakan sebuah komputer *server*, dimana idealnya harus terdapat *backup server* sebagai *server* cadangan seperti yang telah diungkapkan dalam kontrol keamanan sebelumnya. Jadi, perangkat keras yang dipakai dalam SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung terdiri dari dua spesifikasi yaitu *server* dan *work station (client)*, dimana terdapat 1 *server* dan komputer *client* yang ada di laboratorium komputer dan *work station (client)*

yang ada di bidang-bidang minimal satu komputer dengan aplikasi SIMPEDU di setiap Bidang. Spesifikasi *hardware* yang digunakan untuk pelaksanaan SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) *Hardware* komputer *server*:
 - a) Processor Pentium IV 2,4 Ghz
 - b) Hardisk 2x120 GB
 - c) Memory RAM 2GB
 - d) Monitor 15'
 - e) DVD RW
 - f) LAN Card
- 2) *Workstation/Client* (di laboratorium komputer)
 - a) Prosesor Pentium IV 2,4 Ghz
 - b) Hardisk 80 GB
 - c) Memory RAM 1 GB
 - d) Monitor/LCD (15'/17')
 - e) CDRW
- 3) Printer
 - a) Laserjet 4 unit
 - b) Deskjet 7 unit
 - c) Dotmatrix 2 unit (A3) dan 1 unit (A4)
 - d) UPS 3 unit

Namun penggunaan komputer *client* di bidang-bidang lain bervariasi, hal ini diungkapkan oleh Pram Wisnu Seto selaku Administrator SIMPEDU sebagai berikut:

“Beberapa klien bervariasi tetapi semuanya Pentium 4. Yang di lab komputer ada 6 komputer, satu komputer *server* dan 3 komputer yang terdapat program SIMPEDU. Sisanya di bidang-bidang.”

Peralatan ini sudah digunakan secara maksimal, karena mulai dari pemrosesan data hingga pencetakan SK sudah dilakukan menggunakan teknologi komputasi. Hanya saja kondisi komputer dan printer sangat kontras di Bidang-bidang. Di Bidang pengembangan misalnya, kondisi komputer baik dan mencukupi, demikian juga di Bidang sekretariat, namun di Bidang Mutasi dan Pembinaan dan kesejahteraan Pegawai kondisi komputer kurang baik

dan sering terjadi masalah (*trouble*). Hal ini dibuktikan dengan ungkapan F. Deny Kurniawan:

“Sarana dan prasarana belum mencukupi. Komputernya kurang ya...kalau pekerjaannya banyak itu ya menghambat, Komputernya ada 2 di bidang mutasi. Keduanya ada aplikasi SIMPEDUnya. Kalau printernya ada satu tapi sudah akhir. Sudah mau dimasukkan gudang itu” (Wawancara tanggal 17 Desember 2017).

c. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam SIMPEDU pada pengembangan tahun 2007 telah mengalami pembaruan. Perangkat lunak disini adalah berupa teknologi *software* yang digunakan dalam aplikasi SIMPEDU. Perangkat lunak komputer dapat digolongkan menjadi 3, yaitu bahasa pemrograman, perangkat lunak sistem, dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat

lunak (*software*) yang digunakan di BKD Provinsi Lampung berupa aplikasi-aplikasi program yang pada dasarnya menggunakan Window Server 2010 pada komputer *server* dan window XP pada komputer *client* sebagai sistem operasi (*operating system*) nya. Sedangkan untuk aplikasi SIMPEDU menggunakan Delphi dan PHP, serta database yang digunakan adalah database *oracle 9.1* sebagai bahasa pemrogramannya, sedangkan sistem jaringannya dengan window land mapping, seperti keterangan Pram Wisnu Seto Administrator SIMPEDU sebagai berikut:

“Program *software* yang dipergunakan sebagai penunjang pelaksanaan SIMPEDU adalah sistem operasi window 2010, aplikasi Dari perangkat lunak tersebut kemudian dibuat aplikasi-aplikasi program dari berbagai sistem informasi yang tercakup di dalam

SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung. Perangkat lunak yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEDU) di BKD Provinsi Lampung dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Window *Server* 2010 (komputer *server*)
- 2) Window XP (komputer *client*)
- 3) Aplikasi SIMPEDU menggunakan Delphi for PHP
- 4) Database *Oracle* 9.1

Berdasarkan spesifikasi di atas peneliti melihat *software* yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan untuk membuat aplikasi SIMPEDU. Dalam pelaksanaan SIMPEDU, perangkat lunak yang digunakan dirasa sudah berjalan baik karena memungkinkan untuk terus dilakukan pengembangan dengan *software* yang ada.

3. Sub Sistem Hasil Keluaran (*Output*)

Setelah data-data *input* diproses, kemudian informasi dihasilkan dan diberikan kepada

perangkat *Output*. *Output* merupakan suatu hasil dari proses perjalanan informasi untuk kemudian digunakan dalam rangka memberikan informasi yang berguna bagi pelaksanaan fungsi BKD dalam menjalankan manajemen dan pelayanan kepegawaian. *Output* dari SIMPEDU ini nantinya juga digunakan sebagai sumber informasi guna pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Dimana wujud dari pelaksanaan SIMPEDU di BKD ini adalah Surat-surat Keputusan, Informasi Kepegawaian, rekapitulasi PNSD, *Bizzeting*, Daftar Urut Kepegawaian, Analisa Baperjakat dan banyak lagi informasi yang dihasilkan untuk digunakan sebagai sumber informasi baik bagi pelaksanaan tugas intern BKD Provinsi Lampung sendiri maupun untuk *stakeholders*.

Hambatan yang Ditemui dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Dari intern BKD sendiri, disebutkan oleh salah satu staf bahwa terdapat masalah pada saat *penginputan* yakni pada pegawai kadang ada perubahan data tetapi tidak segera dimasukkan ke dalam SIMPEDU karena berkas yang dicari tidak ada, hal ini disebabkan banyaknya berkas yang harus di-*entry* ke dalam program SIMPEDU. Mengenai hal ini juga telah disebutkan sebelumnya mengenai spesialisasi pegawai, bahwa karena adanya perangkapan tugas maka terkadang data SIMPEDU tidak segera di-*update*. Disini nampak masih adanya kekurangan dalam hal keterlibatan dan partisipasi pemakai (*user involvement and participation*), yakni mengenai pertanggungjawaban, keterlibatan pemakai, dan perilaku pemakai.

Upaya yang Telah Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Menurut Silvia bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung menurut Silvia yaitu:

- a. Aplikasi yang ada di SIMPEDU harus terus menerus dilakukan peremajaan data sehingga data yang dihasilkan dapat valid, akurat dan *up to date*. Aplikasi program SIMPEDU harus terus dilakukan pengembangan, juga dilakukan validasi data dengan memperbaiki database SIMPEDU sehingga diharapkan data yang ada di dalam SIMPEDU menjadi sempurna.
- b. Aksesibilitas/konektivitas perlu dilakukan peningkatan/penambahan jaringan akses internet di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian sehingga mampu mengatasi permasalahan lambatnya koneksi langsung ke Badan Kepegawaian Negara sebagai

server pusat pengiriman data pegawai.

- c. SDM yang ada di Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Lampung perlu diikutkan Diklat/pelatihan tentang SIMPEDU sehingga SDM yang ada dapat lebih menguasai tentang SIMPEDU (Wawancara Tanggal 8 Januari 2018).

Upaya yang Belum Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Upaya yang belum dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yaitu Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian telah mengajukan nota dinas ke Bagian Perencanaan untuk diusulkan terkait dengan penambahan sarana dan prasarana komputer,

printer dan ruang *server* agar pelaksanaan SIMPEDU dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan, perlunya pembahasan secara lebih mendalam dengan pimpinan tertinggi terkait dengan SDM dalam pengelolaan SIMPEDU misalnya dengan merekrut Tim Khusus yang memahami sistem aplikasi komputer, serta mengintegrasikan aplikasi SIMPEDU ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah berjalan sesuai dengan alur yang harus dijalani antara lain mencakup sub sistem *input*, sub sistem *proses*, dan sub sistem *output*.

Pengumpulan masih dilakukan secara manual, namun hal ini beralasan untuk menjamin validasi data yang masuk, yakni agar data masuk bersama berkas sebagai syarat administrasi. Untuk isi dan bentuk *input* sudah jelas, dan lengkap. Namun, masih ditemui *input* data yang tidak tepat waktu, baik dari sisi OPD ataupun dari sisi intern BKD.

2. Hambatan yang ditemui dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung antara lain:
 - a. Infrastruktur kurang memadai sehingga dalam penerapan SIMPEDU masih kurang optimal.
 - b. Aksesibilitas/konektivitas jaringan internet masih kurang memadai sehingga terdapat kesulitan dalam *proses* entry data ke dalam SIMPEDU.
 - c. SDM masih kurang memadai.
 - d. Dukungan pemerintah daerah masih belum optimal.
 - e. Anggaran masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan SIMPEDU di BKD Provinsi Lampung
3. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yaitu:
 - a. Aplikasi yang ada di SIMPEDU harus terus menerus dilakukan peremajaan data sehingga data yang dihasilkan dapat valid, akurat dan *up to date*.
 - b. Aksesibilitas/konektivitas perlu dilakukan peningkatan/penambahan jaringan akses internet di bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian.
 - c. SDM yang ada di Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Lampung

perlu diikutkan Diklat/pelatihan tentang SIMPEDU.

4. Upaya yang belum dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung antara lain:

- a. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian telah mengajukan nota dinas ke Bagian Perencanaan untuk diusulkan terkait dengan penambahan sarana dan prasarana komputer, printer dan ruang server agar pelaksanaan SIMPEDU dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.
- b. Perlunya pembahasan secara lebih mendalam dengan pimpinan tertinggi terkait dengan SDM dalam pengelolaan SIMPEDU misalnya dengan merekrut Tim Khusus yang memahami

sistem aplikasi komputer.

- c. Mengintegrasikan aplikasi SIMPEDU ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Saran

Dalam realisasi dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan suatu rekomendasi dan saran yang sifatnya rasional. Oleh karena itu saran yang dapat ditunjukkan dalam penutup penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan belum adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, maka peneliti menyarankan diadakannya pendidikan atau pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik di tingkat staf pelaksana (*operating personel*) ataupun di tingkat manajer yakni Kepala Sub Bagian Informasi Kepegawaian.

2. Hambatan pada pelaksanaan SIMPEDU yang berkaitan dengan kuantitas pegawai di beberapa bidang dapat diatasi dengan menegakkan disiplin pegawai, sehingga saat data sudah siap di-*update*, segera di-*update*-kan kedalam SIMPEDU agar tidak terjadi keterlambatan *update* data.
3. Ketimpangan ketersediaan perangkat keras pendukung dapat diatasi dengan pemerataan ketersediaan komputer di setiap Bidang, terutama pada komputer dengan aplikasi SIMPEDU.
4. Disediaknya *backup server* karena merupakan perangkat yang sangat penting mengingat server SIMPEDU memegang peranan yang sangat vital dalam menyimpan seluruh informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
5. Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Komunikasi dan Informatika

sebaiknya dilakukan. Hal ini untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan data bagi *stakeholders* dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keadaan pegawai di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan sebagai sarana komunikasi antara BKD Provinsi Lampung dengan OPD untuk dapat lebih mengontrol pelaporan perubahan data pegawai dari OPD.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amsyah, Zulkifli. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bacal, Robert. 2001. *Performance Management*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Davis, Gordon B. 2003. *Management Information System*. Salemba Empat. Jakarta.
- . 2007. *Kerangka Dasar Sistem Informasi*

- Manajemen*. PT Pustaka Binaan Pressindo. Jakarta.
- Dewi, Peranita Kartika. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Effendy, Onong U. 2007. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kencana, Inu. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Andi. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Margono. 2004. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- . 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AM. Yogyakarta.
- McLeod, Raymond dan Schell, George P. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. PT Indeks. Jakarta.
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rackmat, Jalaludin. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Scott, George M. 2004. *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Sistem Informasi Manajemen (Perspektif Organisasi)*. CAPS. Yogyakarta.

- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Andi. Yogyakarta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Prenada Media Grop. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2006. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wursanto, I.G. 2003. *Manajemen Kepegawaian 2*. Kanisius. Yogyakarta.
- B. SUMBER LAIN**
- Undang-Undang No 43 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

